

Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Good Governance Terhadap Kinerja Instansi Pada OPD Kota Palembang

Zahara Adelia Sani¹, Choiruddin², Desri Yanto³

¹Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang, zaharaadeliasani1@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the influence of accountability, transparency, and good governance on the institutional performance of Regional Apparatus Organizations (OPDs) in Palembang City. A quantitative research approach was used. Primary data were collected through a questionnaire distributed to OPD employees in Palembang City. Purposive sampling was used, resulting in a sample of 45 respondents. Data analysis involved data quality tests, classical assumption tests, multiple linear regression analysis, determination coefficient (R^2) tests, partial tests (t-tests), and simultaneous tests (F-tests) using IBM SPSS Statistics software. The results showed that, individually (partially), accountability had a positive and significant effect on institutional performance. Conversely, transparency and good governance did not have a significant effect on institutional performance. However, when considered together, accountability, transparency, and good governance significantly affect the institutional performance of Palembang City OPDs. These findings show that increased accountability plays an important role in improving institutional performance, while transparency and good governance have not yet exerted individual influence on these performances. This research is expected to be the basis for evaluation by local governments to improve the quality of governance and institutional performance through the application of the principles of accountability, transparency, and good governance in a sustainable manner.

Keywords: Accountability, Transparency, Good Governance, Agency Performance, Regional Apparatus Organization.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang baik terhadap kinerja kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Palembang. Pendekatan penelitian kuantitatif digunakan. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner yang dibagikan kepada pegawai OPD di Kota Palembang. Purposive sampling digunakan, menghasilkan sampel 45 responden. Analisis data melibatkan uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji koefisien penentuan (R^2), uji parsial (uji-t), dan uji simultan (uji-F) menggunakan perangkat lunak IBM SPSS Statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara individu (sebagian), akuntabilitas memiliki efek positif dan signifikan terhadap kinerja kelembagaan. Sebaliknya, transparansi dan tata kelola yang baik tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja kelembagaan. Namun, jika dipertimbangkan secara bersamaan, akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang baik secara signifikan mempengaruhi kinerja kelembagaan OPD Kota Palembang. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan akuntabilitas memainkan peran penting dalam meningkatkan kinerja kelembagaan, sedangkan transparansi dan tata kelola yang baik belum memberikan pengaruh individu pada kinerja tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan kinerja kelembagaan melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang baik secara berkelanjutan.

Kata kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Good Governance, Kinerja Instansi, Organisasi Perangkat Daerah.

A. PENDAHULUAN

Tata kelola keuangan pemerintah di Indonesia telah mengalami perubahan pada saat bergulirnya reformasi. Perubahan ini muncul karena adanya desentralisasi



yang melahirkan otonomi daerah. Desentralisasi ini bertujuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di setiap daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan masing-masing pemerintah daerah. (Wahyuni et al., 2025). Dari (Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 2014) tentang Pemerintah Daerah dapat disimpulkan bahwa dengan menjalankan tugas dan wewenangnya, pemerintah daerah dapat melaksanakan pembangunan dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat untuk keberhasilan pelaksanaan pembangunan serta dapat bertanggung jawab atas alokasi dana yang dialokasikan.

Kondisi kinerja dibidang politik dan ekonomi di negara Indonesia ini adalah dengan adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menjalankan suatu Anggaran Pemerintahan. Salah satu usaha yang dapat mengembalikan kondisi ekonomi, sosial maupun politik ini ialah dengan cara mengembalikan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan cara mewujudkan suatu pemerintahan yang bertanggungjawab biasa dikenal dengan istilah Good Governance. Dengan adanya Good Governance ini tingkat dari suatu kejujuran pemerintah dan syarat utama dalam mewujudkan aspirasi masyarakat adalah dengan mencapai suatu tujuan dan cita cita negara. Sehingga dalam peran utama pelaksanaan Good Governance ini juga dituntut untuk memberikan tanggung jawab yang lebih jelas (Ambarwati, 2021).

Kinerja juga merupakan suatu hasil yang perlu dilaporkan dengan pihak berwajib guna mengetahui hasil dari suatu instansi dengan adanya tujuan salah satu organisasi dengan mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dari suatu kebijakan operasional tersebut. Dengan terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih untuk mewujudkan keinginan masyarakat, pemerintah yang baik juga memiliki hasil dari kegiatan yang telah direncanakan berhasil mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat (Ambarwati, 2021). Menurut (Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 2014) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang telah dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, mengelompokkan, menyimpulkan dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Kinerja Instansi pada OPD di Pemerintah Kota Palembang masih menunjukkan adanya perbedaan pencapaian dan beberapa kendala dalam pelayanan publik yang dapat diartikan belum sepenuhnya berhasil, karena menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan OPD dengan menerapkan Good Governance secara baik sehingga kinerja meningkat, dengan adanya kenyataannya masih terdapat kelemahan dalam Akuntabilitas dan Transparansi yang mempengaruhi Kinerja Instansi. Organisasi sektor publik juga merupakan salah satu pemerintah daerah yang ditunjuk untuk bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan memberikan pembagian tugas yang baik bagi pemerintah. Menurut (Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 2014) tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan adanya perubahan susunan dan kewenangan pemerintah daerah. Otonomi daerah yang seluas luasnya diharapkan agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, kualitas dan pemberdayaan masyarakat.

B. KAJIAN TEORI

Teori *Stewardship*

Stewardship Theory yang dikemukakan oleh (Donaldson dan Davis, 1991) menggambarkan bahwa tidak ada suatu keadaan situasi para manajemen termotivasi untuk tujuan-tujuan individu melainkan lebih fokus untuk tujuan sasaran utama yaitu kepentingan organisasi. Asumsi filosofi mengenai teori ini dibangun berdasarkan sifat manusia yang dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggungjawab, memiliki integritas, serta dapat berlaku jujur untuk pihak lainnya. Teori *stewardship* mempunyai akar psikolog dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai steward dan bertindak sesuai kepentingan pemilik. Teori ini menggambarkan hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi dapat dicapai dengan cara memaksimalkan utilitas principals dan manajemen. Menurut teori *stewardship* kepentingan bersama adalah dasar seorang stewards melakukan tindakan. Sehingga apabila terdapat perbedaan kepentingan antara *principals* dan *stewards*, maka stewards akan berusaha bekerjasama untuk bertindak sesuai dengan tindakan *principals* dan demi kepentingan bersama agar tercapainya tujuan bersama. Prinsip akuntansi merupakan alat pengendalian diri, sebagai sarana pelaporan aktivitas manajer atas pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan. Dengan adanya keterbatasan, pemilik sumber daya menyerahkan amanah pengelolaan sumber daya kepada pihak lain (*stewards/manajemen*) yang lebih siap.

Kinerja Instansi

Kinerja instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai keputusan kepala lembaga administrasi negara nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi Pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi Pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan (Wulansari & Budi, 2024).

Akuntabilitas

Akuntabilitas biasanya berarti kewajiban pemberian pertanggungjawaban ataupun menjawab tentang tindakan dan kinerja instansi hukum atau pimpinan organisasi pada pihak yang berwenang. Secara sempit, akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban yang berpedoman pada individu lain serta tujuan pertanggungjawaban organisasi (Masdianah et al., 2024). Akuntabilitas juga merupakan salah satu prinsip utama dalam pengelolaan sektor publik yang menekankan kewajiban setiap lembaga untuk bisa mempertanggungjawabkan tindakan, keputusan, dan penggunaan sumber daya yang dipercaya oleh mereka kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Dalam situasi pemerintahan akuntabilitas ini berarti bahwa setiap instansi pemerintah harus bisa memberikan penjelasan atas setiap kebijakan dan tindakan yang diambil, baik kepada atasan maupun kepada masyarakat luas.

Transparansi

(Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010), transparansi merupakan memberikan informasi keuangan

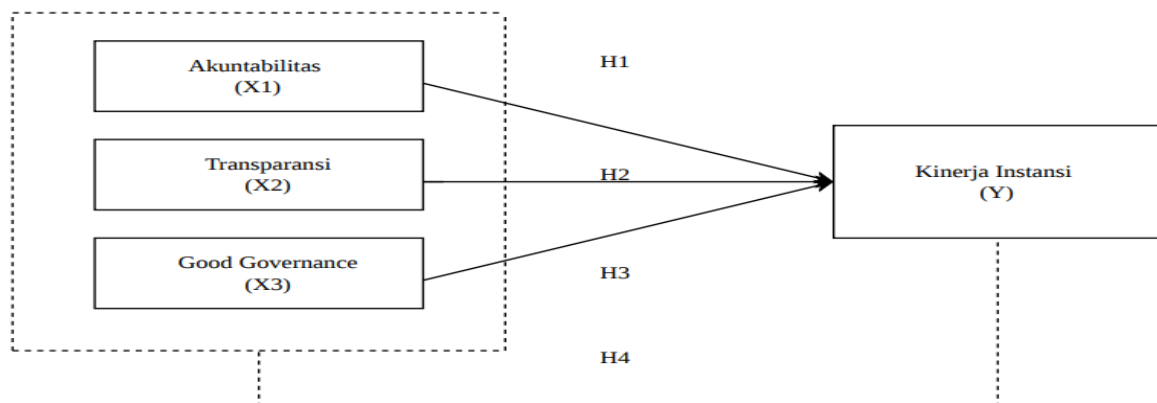


yang terbuka dan jujur kepada masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa sahnya masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas mempertanggungjawabkan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Kejujuran dan keterbukaan adalah dua prinsip penting dalam pengelolaan organisasi yang efektif, dan keterbukaan berarti seluruh perbuatan perusahaan harus memiliki ketelitian yang tinggi agar dapat memperoleh pengawasan dari publik (Masdianah et al., 2024).

Good Governance

Good governance merupakan cita-cita yang menjadi misi setiap penyelenggaraan suatu negara, termasuk Indonesia. *Good governance* dapat diartikan sebagai prinsip dalam mengatur pemerintahan yang memungkinkan layanan publiknya efisien, sistem pengadilannya bisa diandalkan dan administrasinya bertanggung jawab pada publik (Wulansari & Budi, 2024). Peranan akuntansi sektor publik ditujukan untuk memberikan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik. Keberhasilan dalam suatu pelayanan publik salah satunya dapat diukur dari akses pelayanan publiknya. Contohnya jika suatu daerah tidak bisa mendapatkan pelayanan dasar yang seharusnya bisa diterima oleh masyarakat maka hal tersebut akan berdampak pada kesejahteraan seluruh masyarakat oleh karena itu peran pemerintahan sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Oleh karenanya, diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Karilian et al., 2023).

Kerangka Pemikiran



Gambar Kerangka Pemikiran

Hipotesis

Menurut (Masdianah et al., 2024) Akuntabilitas biasanya berarti kewajiban pemberian pertanggungjawaban ataupun menjawab tentang tindakan dan kinerja instansi hukum atau pimpinan organisasi pada pihak yang berwenang. Secara sempit, akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban yang berpedoman pada individu lain serta tujuan pertanggung jawaban organisasi. Menurut hasil penelitian terdahulu (Kusuma & Mildawati, 2021) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi, begitu juga menurut (Marismiati &

Hardiyanti, 2026) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi. Berdasarkan uraian diatas dalam penelitian ini sebagai berikut:

H₁: Akuntabilitas berpengaruh terhadap Kinerja Instansi OPD Kota Palembang.

Transparansi dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu kebijakan terbuka terhadap pengawasan, akses informasi sehingga masyarakat sebagai prinsipal bisa menjangkau tiap segi kebijakan pemerintah sebagai agen, dan berlakunya prinsip check and balance antara lembaga eksekutif dan legislatif (Kusuma & Mildawati, 2021). Menurut hasil penelitian terdahulu (Putra & Cornelius Rantelangi, 2022) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi, begitu juga menurut (Kusuma & Mildawati, 2021) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi. Berdasarkan uraian diatas dalam penelitian ini sebagai berikut:

H₂: Transparansi berpengaruh terhadap Kinerja Instansi OPD Kota Palembang.

Good governance adalah cita-cita yang menjadi misi setiap penyelenggaraan suatu negara, termasuk Indonesia. *Good governance* dapat diartikan sebagai prinsip dalam mengatur pemerintahan yang memungkinkan layanan publiknya efisien, sistem pengadilannya bisa diandalkan dan administrasinya bertanggung jawab pada publik. (Wulansari & Budi, 2024). Menurut hasil penelitian terdahulu (Heluka et al., 2022) menyatakan bahwa *good governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi, begitu juga menurut (Wulansari & Budi, 2024) menyatakan bahwa *good governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi. Berdasarkan uraian diatas dalam penelitian ini sebagai berikut:

H₃: Good Governance berpengaruh terhadap Kinerja Instansi OPD Kota Palembang.

Hipotesis ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Menurut penelitian terdahulu (Kusuma & Mildawati, 2021) Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kinerja pemerintah yaitu penerapan akuntabilitas diharapkan dapat menghindari adanya penyalahgunaan atau penyelewengan dalam proses pengelolaan anggaran. Para pegawai akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya jika penyusunan anggaran dilakukan secara jelas, transparansi juga berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah.

Menurut penelitian terdahulu (Wulansari & Budi, 2024) Pengaruh Penerapan *Good Governance* Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah yaitu *Good governance* adalah cita-cita yang menjadi misi setiap penyelenggaraan suatu negara, termasuk Indonesia. *Good governance* dapat diartikan sebagai prinsip dalam mengatur pemerintahan yang memungkinkan layanan publiknya efisien, sistem pengadilannya bisa diandalkan dan administrasinya bertanggung jawab pada publik. Hasil penelitian sebelumnya bahwa *good governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah. Dari definisi di atas maka terlihat bahwa pentingnya untuk dilihat sebagai langkah awal sebelum kesimpulan diambil, berdasarkan



kenyataan tersebut hipotesis yang bisa dikembangkan adalah sebagai berikut:

H₄: Akuntabilitas, Transparansi, dan Good Governance secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Instansi OPD Kota Palembang.

C. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada laporan ini adalah penelitian dengan metode kuantitatif. (Sugiyono, 2023:15) menyatakan bahwa metode kuantitatif dinamakan metode tradisional, karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini disebut sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini sebagai metode ilmiah/*scientific* karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini juga disebut metode *discovery*, karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Palembang. Mengingat luasnya cakupan organisasi, maka populasi difokuskan pada tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mewakili karakteristik pelayanan berbeda, yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Perindustrian Kota Palembang. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *sumpling jenuh*, jika populasinya kurang dari 100 maka semua populasi dijadikan sampel, namun bila populasinya lebih dari seratus maka bisa diambil 10-15% dari jumlah populasinya (Sugiyono, 2023:128). Dikarenakan dalam penelitian ini jumlah populasinya berjumlah 45 orang, populasi kurang dari seratus maka dari itu peneliti mengambil semua populasi dari jumlah populasi sebanyak 45 orang sampel karyawan di organisasi perangkat daerah kota Palembang.

Persamaan analisis regresi linear berganda didalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Didalam metode analisis regresi linear berganda pengujian yang dibuat melalui beberapa pengujian yaitu:

1. Analisis Statistik Deskriptif
2. Uji Analisis Data terdiri dari Uji Validitas dan Uji Realibilitas
3. Uji Asumsi Klasik terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas dan Uji Heteroskedastisitas
4. Uji Hipotesis terdiri dari yang terdiri dari Uji Koefisien Determinasi (R^2), Uji Signifikan simultan (Uji F), dan Uji Signifikan Parsial (Uji T)
5. Uji Regresi Linear Berganda

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Berikut ini adalah uji analisis statistik deskriptif dari penelitian ini dengan variabel independen Akuntabilitas, Transparansi, dan *Good Governance* dengan

variabel dependen Kinerja Instansi. Pengujian ini menggunakan bantuan *software SPSS Version 25*.

Descriptives					
[DataSet0]					
Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Akuntabilitas	45	22.00	30.00	26.2667	2.38747
Tranparansi	45	54.00	69.00	60.1778	5.12254
Good Governance	45	54.00	79.00	67.6222	6.11365
Kinerja Instansi	45	61.00	88.00	77.5111	6.55266
Valid N (listwise)	45				

Sumber: Data yang diolah (Output SPSS), 2026

Uji Analisis Data Uji Validitas Kinerja Instansi

Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1.	0,627	0,294	Valid
2.	0,647	0,294	Valid
3.	0,699	0,294	Valid
4.	0,456	0,294	Valid
5.	0,450	0,294	Valid
6.	0,742	0,294	Valid

Sumber: Data yang diolah (Output SPSS), 2026

Hasil uji validitas terhadap variabel Kinerja Instansi (Y) diperoleh dengan membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} . Berdasarkan dari total 6 item pertanyaan yang diajukan peneliti kepada responden seluruh pernyataan bernilai valid yaitu semua r_{hitung} diatas r_{tabel} , yaitu 0,294. Pernyataan dengan nilai r_{tabel} paling besar untuk terdapat pada pernyataan 6 dengan nilai r_{hitung} 0,742, sedangkan pernyataan dengan nilai r_{hitung} paling kecil pda pernyataan 5 dengan r_{hitung} sebesar 0,450.

Akuntabilitas

Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1.	0,508	0,294	Valid
2.	0,356	0,294	Valid
3.	0,381	0,294	Valid
4.	0,400	0,294	Valid
5.	0,543	0,294	Valid
6.	0,638	0,294	Valid
7.	0,748	0,294	Valid
8.	0,527	0,294	Valid
9.	0,377	0,294	Valid
10.	0,539	0,294	Valid
11.	0,430	0,294	Valid

Sumber: Data yang diolah (Output SPSS), 2026

Hasil uji validitas terhadap Akuntabilitas (X1) diperoleh dengan membandingkan



nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} . Dengan hasil r_{tabel} diperoleh nilai sebesar 0,294 sedangkan hasil r_{hitung} yang diperoleh dari SPSS diketahui dari 11 item pernyataan data uji cobainstrumen Akuntabilitas (X1) semua instrumen penelitian adalah valid atau semua $r_{hitung} > r_{tabel}$. Sehingga dari 11 item pernyataan dalam angket Kompetensi Akuntabilitas (X1) semua item dapat dipergunakan untuk penelitian. Pernyataan dengan nilai r_{tabel} paling besar untuk terdapat pada pernyataan 7 dengan nilai r_{hitung} 0,748, sedangkan pernyataan dengan nilai r_{hitung} paling kecil pada pernyataan 2 dengan r_{hitung} sebesar 0,356.

Transparansi

Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1.	0,645	0,294	Valid
2.	0,626	0,294	Valid
3.	0,481	0,294	Valid
4.	0,580	0,294	Valid
5.	0,673	0,294	Valid
6.	0,489	0,294	Valid
7.	0,419	0,294	Valid
8.	0,524	0,294	Valid
9.	0,681	0,294	Valid

Sumber: Data yang diolah (Output SPSS), 2026

Hasil uji validitas terhadap Transparansi (X2) diperoleh dengan membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} . Dengan hasil r_{tabel} diperoleh nilai sebesar 0,294 sedangkan hasil r_{hitung} yang diperoleh dari SPSS diketahui dari 9 item pernyataan data uji coba instrumen Transparansi (X2) semua instrumen penelitian adalah valid atau semua $r_{hitung} > r_{tabel}$. Sehingga dari 9 item pernyataan dalam angket Kompetensi Transparansi (X2) semua item dapat dipergunakan untuk penelitian. Pernyataan dengan nilai r_{tabel} paling besar untuk terdapat pada pernyataan 9 dengan nilai r_{hitung} 0,681, sedangkan pernyataan dengan nilai r_{hitung} paling kecil pada pernyataan 7 dengan r_{hitung} sebesar 0,419.

Good Governance

Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1.	0,410	0,294	Valid
2.	0,605	0,294	Valid
3.	0,598	0,294	Valid
4.	0,388	0,294	Valid
5.	0,409	0,294	Valid
6.	0,298	0,294	Valid
7.	0,604	0,294	Valid
8.	0,440	0,294	Valid
9.	0,354	0,294	Valid
10.	0,702	0,294	Valid
11.	0,470	0,294	Valid
12.	0,660	0,294	Valid
13.	0,501	0,294	Valid
14.	0,508	0,294	Valid
15.	0,698	0,294	Valid

Sumber: Data yang diolah (Output SPSS), 2026

Hasil uji validitas terhadap Good Governance (X3) diperoleh dengan membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} . Dengan hasil r_{tabel} diperoleh nilai sebesar 0,294 sedangkan hasil r_{hitung} yang diperoleh dari SPSS diketahui dari 9 item

pernyataan data uji coba instrumen *Good Governance* (X3) semua instrumen penelitian adalah valid atau semua $r_{hitung} > r_{tabel}$. Sehingga dari 9 item pernyataan dalam angket Kompetensi *Good Governance* (X3) semua item dapat dipergunakan untuk penelitian. Pernyataan dengan nilai r_{tabel} paling besar untuk terdapat pada pernyataan 15 dengan nilai r_{hitung} 0,981, sedangkan pernyataan dengan nilai r_{hitung} paling kecil pada pernyataan 6 dengan r_{hitung} sebesar 0,298.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
			Unstandardized Residual
N			45
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	1.25836483	
Most Extreme Differences	Absolute	.143	
	Positive	.143	
	Negative	-.109	
Test Statistic			.143
Asymp. Sig. (2-tailed)			.022 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.286 ^d	
	95% Confidence Interval	Lower Bound	.278
		Upper Bound	.295

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

Sumber: Data yang diolah (Output SPSS), 2026

Perhitungan dari *output* diatas dapat diketahui bahwa nilai *signifikan Asymp Sig (2 tailed)* yang diperoleh dari hasil perhitungan *Kolmogorov-Smimov* adalah 0,295 yang berarti signifikan lebih dari 0,05 ($0,295 > 0,05$). Nilai residual perhitungan dari *output* diatas dapat diketahui bahwa nilai *signifikansi Asymp Sig (2 tailed)* yang diperoleh dari hasil perhitungan *Kolmogorov-Smimov* adalah 0,295 yang berarti signifikan lebih dari 0,05 ($0,200 > 0,05$).

Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	6.775	2.969	2.282	.028		
	TOTAL.X1	.234	.102	.428	.027	.322	3.105
	TOTAL.X2	.172	.108	.291	.119	.335	2.986
	TOTAL.X3	.031	.054	.079	.570	.583	1.717

a. Dependent Variable: TOTAL.Y

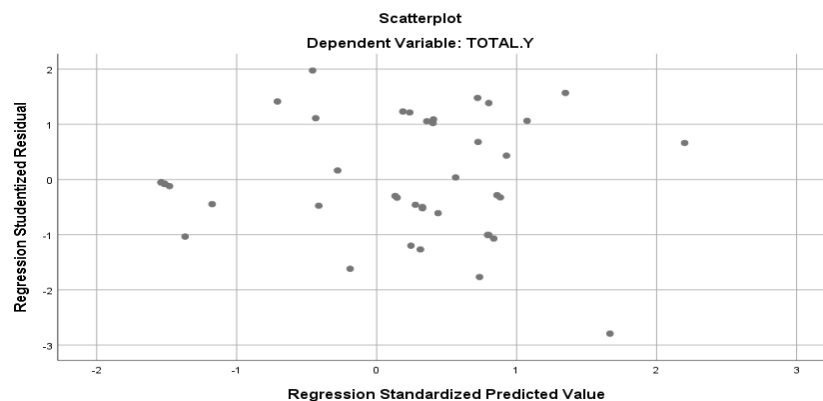
Sumber: Data yang diolah (Output SPSS), 2026



is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Uji Multikolinearitas yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas uji pendekatan, yaitu dengan melihat nilai tolerance dan VIF dan membandingkan koefisien determinasi. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna diantara variabel bebas. Nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena $VIF = 1/\text{tolerance}$) dan menunjukkan kolinearitas yang tinggi. Nilai cut off yang umum dipakai adalah nilai tolerance $> 0,10$ atau sama dengan nilai VIF di atas 10.

Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data yang diolah (Output SPSS), 2026

Uji heteroskedastisitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melihat pola titik-titik pada scatterplot untuk variabel Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), Good Governance (X3), dan Kinerja Instansi (Y). Berdasarkan output yang dihasilkan SPSS pada dapat diketahui bahwa titik-titik tidak membentuk pola yang jelas dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi.

Uji Realibilitas

No.	Variabel	Standar Koefisien Alpha	Cronbach's Alpha	Keterangan
1.	Akuntabilitas	0,60	0,697	Reliabel
2.	Transparansi	0,60	0,724	Reliabel
3.	Good Governance	0,60	0,806	Reliabel
4.	Kinerja Instansi	0,60	0,650	Reliabel

Sumber: Data yang diolah (Output SPSS), 2026

Tabel Uji Reliabilitas menunjukkan nilai *Cronbach Alpha* melebihi 0,60 sehingga instrumen kuesioner yang digunakan dapat dikatakan handal.. Nilai 0,60 dikategorikan melebihi tingkat signifikan yang ditetapkan yaitu dimana nilai *Cronbach Alpha* tertinggi terdapat pada variabel *Good Governance* yaitu 0,806 dan dikategorikan baik, lalu untuk variabel kompetensi kinerja instansi yaitu 0,650 dan variabel akuntabilitas 0,697 dan variabel transparansi 0,724. Variabel-variabel tersebut pun semuanya dikategorikan baik karena berada diatas 0,6.

Uji Hipotesis Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.775	2.969		2.282	.028
	TOTAL.X1	.234	.102	.428	2.300	.027
	TOTAL.X2	.172	.108	.291	1.593	.119
	TOTAL.X3	.031	.054	.079	.570	.572

a. Dependent Variable: TOTAL.Y

Sumber: Data yang diolah (Output SPSS), 2026

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = 6.775 + 0,234X_1 + 0,172X_2 + 0,031X_3 + e$$

Uji Koefisien Uji R

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.737 ^a	.543	.510	1.30359

a. Predictors: (Constant), TOTAL.X3, TOTAL.X2, TOTAL.X1

b. Dependent Variable: TOTAL.Y

Sumber: Data yang diolah (Output SPSS), 2026

Hasil perhitungan statistik diperoleh nilai R sebesar 0,737 yang menunjukkan hubungan yang sangat erat antara variabel akuntabilitas, transparansi dan good governance terhadap kinerja instansi, karena nilai mendekati 1. Variabel independen dalam penelitian ini lebih dari satu, maka sebaiknya untuk melihat kemampuan variabel memprediksi variabel dependen, dalam penelitian ini nilai yang digunakan adalah nilai adjusted R². Nilai adjusted R² sebesar 0,543 hal ini berarti 54,3% variasi kinerja instansi dapat dijelaskan oleh variasi dari tiga variabel independen yaitu akuntabilitas, transparansi, dan good governance, sedangkan sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model sebesar 45,7% (100%-54,3%).

Uji T

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.775	2.969		2.282	.028
	TOTAL.X1	.234	.102	.428	2.300	.027
	TOTAL.X2	.172	.108	.291	1.593	.119
	TOTAL.X3	.031	.054	.079	.570	.572

a. Dependent Variable: TOTAL.Y

Sumber: Data yang diolah (Output SPSS), 2026



is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Dalam 57 melihat signifikansi tiap variabel, maka dapat dilihat dari nilai thitung dan ttabel setiap variabel X. Jika nilai thitung > ttabel maka secara individual (parsial), variabel X dapat dinyatakan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Y, dan jika nilai thitung < 0,05 atau 5% maka hipotesis dapat diterima.

Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	82.905	3	27.635	16.262	.000 ^b
	Residual	69.673	41	1.699		
	Total	152.578	44			

a. Dependent Variable: TOTAL.Y

b. Predictors: (Constant), TOTAL.X3, TOTAL.X2, TOTAL.X1

Sumber: Data yang diolah (Output SPSS), 2026

Dari hasil output SPSS tersebut terlihat bahwa nilai signifikan untuk pengaruh kejelasan Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), dan Good Governancae (X3) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi (Y) adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai Fhitung 16,262 > Ftabel 2,833. Artinya hipotesis (H3) diterima. Dengan kata lain, Akuntabilitas, Transparansi, dan Good Governance secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja Instansi OPD Kota Palembang.

Pembahasan

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi OPD Kota Palembang

Hasil Uji T menjelaskan bahwa Akuntabilitas memiliki pengaruh Terhadap Kinerja Instansi. Uji T menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} 2,300 yang artinya lebih besar dari t_{tabel} 1.6828 ($2,300 > 1.6828$) sehingga dapat disimpulkan bahwa H_a diterima yang berarti terdapat pengaruh antara Akuntabilitas (X1) terhadap Kinerja Instansi (Y). Dan nilai signifikansi adalah sebesar 0,027 yang artinya lebih besar dari 0,05 ($0,05 > 0,027$). Menurut hasil penelitian terdahulu (Kusuma & Mildawati, 2021) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi, begitu juga menurut (Marismiaty & Hardiyanti, 2026) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi.

Hasil uji hipotesis yang dihasilkan bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi, maka dari itu hipotesis (H1) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja instansi diterima. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat akuntabilitas yang diterapkan OPD Kota Palembang, maka semakin baik pula kinerja instansi yang dihasilkan. Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja instansi itu karena setiap pegawai OPD memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab dalam melaksanakan program, penggunaan anggaran, dan hasil kerja yang telah dilakukan.

Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Instansi OPD Kota Palembang

Hasil Uji T menjelaskan bahwa Transparansi tidak memiliki pengaruh Terhadap Kinerja Instansi. Uji T menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} 1.6828 yang artinya lebih kecil dari t_{tabel} 1.6828 ($1,593 < 1.6828$) sehingga dapat disimpulkan bahwa H_a tidak diterima yang berarti tidak terdapat pengaruh antara Transparansi (X2) terhadap

Kinerja Instansi (Y). Dan nilai signifikansi adalah sebesar 0,119 yang artinya lebih besar dari 0,05 ($0,119 > 0,05$). Hasil penelitian terdahulu (Samita & Darwis Lannai, 2026) menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi.

Hasil pengujian hipotesis yang diperoleh bahwa variabel transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi, maka hipotesis (H2) yang dihasilkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap kinerja instansi ditolak. Transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi karena keterbukaan informasi yang dilakukan oleh OPD belum tentu mempengaruhi secara langsung pelaksanaan pekerjaan pegawai, sehingga lebih berfungsi pemenuhan kewajiban administrasi daripada faktor peningkatan produktivitas kerja. Transparansi menunjukkan bahwa belum mampu untuk memberikan pengaruh secara langsung terhadap peningkatan kinerja instansi.

Pengaruh Good Governance Terhadap Kinerja Instansi OPD Kota Palembang

Hasil Uji T menjelaskan bahwa *Good Governance* tidak memiliki pengaruh Terhadap Kinerja Instansi. Uji T menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} 0,570 yang artinya lebih kecil dari t_{tabel} 1.6828 ($1.6828 < 0,570$) sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima yang berarti terdapat pengaruh antara *Good Governance* (X3) terhadap Kinerja Instansi (Y). Dan nilai signifikansi adalah sebesar 0,572 yang artinya lebih besar dari 0,05 ($0,05 > 0,572$). Menurut hasil penelitian terdahulu (Heluka et al., 2022) menyatakan bahwa *good governance* tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja instansi, begitu juga menurut (Wulansari & Budi, 2024) menyatakan bahwa *good governance* tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja instansi. menyatakan bahwa *good governance* tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja instansi.

Hasil pengujian hipotesis yang diperoleh bahwa variabel *good governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi, sehingga (H3) yang menyatakan bahwa *good governance* berpengaruh terhadap kinerja instansi ditolak. *Good Governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi karena penerapan prinsip *good governance* belum sepenuhnya diterapkan secara optimal dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Dengan demikian juga teori *stewardship theory* mengatakan kinerja instansi lebih dipengaruhi oleh kesadaran individu daripada penerapan prinsip *good governance* secara formal, sehingga menyebabkan *good governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi.

Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Good Governance Terhadap Kinerja Instansi OPD Kota Palembang

Hasil Uji F menjelaskan bahwa secara simultan bahwa nilai signifikan untuk pengaruh kejelasan Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), dan *Good Governance* (X3) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi (Y) adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai F_{hitung} 16,262 $> F_{tabel}$ 2,833. Artinya hipotesis (H3) diterima. Dengan kata lain, Akuntabilitas, Transparansi, dan *Good Governance* secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja Instansi OPD Kota Palembang.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Instansi dapat



- sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima yang berarti terdapat pengaruh antara Akuntabilitas (X_1) terhadap Kinerja Instansi (Y).
2. Transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Instansi sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 tidak diterima yang berarti tidak terdapat pengaruh antara Transparansi (X_2) terhadap Kinerja Instansi (Y).
 3. *Good Governance* (X_3) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Instansi sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 tidak diterima yang berarti terdapat pengaruh antara *Good Governance* (X_3) terhadap Kinerja Instansi (Y).
 4. Akuntabilitas (X_1), Transparansi (X_2), dan *Good Governance* (X_3) berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Instansi (Y) yang artinya (H_3) diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah dengan Pemanfaatan Accounting Information System sebagai Pemoderasi. *Journal of Business and Economics (JBE) UPI YPTK*, 6 (3), 9.
- Amelia, H. L., & Hidajat, S. (2025). Pengaruh Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Keuangan Instansi Publik. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8 (2), 12.
- Azizah, S. N., & Hidayat, M. T. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Sistem Pengendalian Intern, Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Organisasi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Surabaya. *Student Research*, 1 (2), 21.
- Damaiyanti, I. P., Zuliyana, M., & Aryani, D. S. (2024). Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah BPKAD Kabupaten Pali Sumatera Selatan. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 8 (1), 9.
- Heluka, R., Pattiasina, V., Sutisman, E., & Melyanus Bonsapia, A. P. (2022). Dampak Penerapan Good Governance, Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Journal of Business Application*, 1 (1), 14.
- Karilian, N., Lewaru, T. S., & Kriswantini, D. (2023). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Good Governance Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Riset Ilmu Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 1 (3), 7.
- Kusuma, A. F., & Mildawati, T. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10 (9), 18.
- Marismiati, & Hardiyanti, M. (2026). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bandung. *Land Journal*, 6 (1), 9.
- Masdianah, Wonar, K., Z.D, A. S., J.C, B. P., Salle, H. T., & Bleskadit, N. H. (2024). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep Value for Money Terhadap

- Pengelolaan Keuangan Sektor Publik Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) Provinsi Papua. *CAKRAWALA*, 6 (3), 14.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa (1999).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (2010).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (2006).
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (2014).
- Putra, D. D., & Cornelius Rantelangi, F. D. (2022). Pengaruh transparansi, akuntabilitas dan pengendalian intern terhadap kinerja instansi pemerintah pada dinas perdagangan Kota Samarinda. *Akuntansi Mulawarman*, 11.
- Samita, & Darwis Lannai, M. N. (2026). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Instansi Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 9 (2), 5.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif dan R&D*.
- Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (2008).
- Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Pengesahan Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim) (2004).
- Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (2014).
- Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (2004).
- Wahyuni, S., Ahyaruddin, M., & Putri, A. M. (2025). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada OPD Provinsi Riau). *JURNAL ECONOMICA*, VIII (1), 13.
- Wulansari, Y., & Budi, I. R. (2024). Pengaruh Penerapan Good Governance Dan Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya. *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 13 (2), 16.
- Yuliana, Nasrizal, & Julita. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Dan Profesionalisme Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Desa-Desa Pada Kabupaten Kepulauan Meranti). *Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi Dan Manajemen*, 2 (1), 9.

